



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526768/2020**

Revisi ke 02

Tanggal : 31 Maret 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
4. Kode>Nama Satker : (526768) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
- Sebesar : Rp. 57.150.000 (LIMA PULUH TUJUH JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)
005.05.09.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 57.150.000
Rp. 57.150.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	57.150.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SIDOARJO (165) Rp. 57.150.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

JAKARTA, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526768/2020
IA. INFORMASI KINERJA



DS:2403-8802-3802-2751

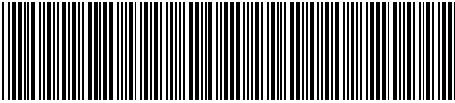
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (526768) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : DJOKO PRIJONO, SE.
Bendahara Pengeluaran : ENDAH SUSILORINI, SE.
Pejabat Penanda Tangan SPM : NAILY MADDA ALLIN, SE, SH.

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			57.150.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			57.150.000
2 Program	005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)			57.150.000
Sasaran Program	01	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan, Cepat, Biaya Ringan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
Indikator Kinerja Program	01	Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang diselesaikan Tepat Waktu, Sidang keliling	3044	Perkara	
	02	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Tepat Waktu	3067	Perkara	
	03	Perkara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	44	Perkara	
	04	Masyarakat Penerima Layanan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara	8640	Jam Layanan	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
Indikator Output Program	01	Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer Termasuk Penyelesaian Perkara Yang Kurang dari 5 (lima) bulan	3044	Perkara	
	02	Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	3067	Perkara	
	03	Perkara Yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	44	Perkara	
	04	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	8640	Jam Layanan	
Kegiatan	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			57.150.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN			
	02	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN			
	03	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara			
	04	Dukungan Penyelesaian Perkara			
	05	Tenaga Teknis Yang Kompeten di Bidang Hukum dan Administrasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
Output Kegiatan	1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	238 Perkara		25.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	3067	Perkara	
Output Kegiatan	1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara [PN]	1 Perkara		350.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Prodeo	44	Perkara	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526768/2020
IA. INFORMASI KINERJA



DS:2403-8802-3802-2751

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (526768) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Kuasa Pengguna Anggaran : DJOKO PRIJONO, SE.
Bendahara Pengeluaran : ENDAH SUSILORINI, SE.
Pejabat Penanda Tangan SPM : NAILY MADDA ALLIN, SE, SH.

Halaman : IA.2				
Output Kegiatan	1059.003	Pos Bantuan Hukum	288 Jam Layanan	31.800.000
Indikator Output Kegiatan	01	[PN] Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN	8640 Jam Layanan	

JAKARTA, 12 November 2019
Direktur Jenderal Badilmitun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526768/2020
I B. SUMBER DANA



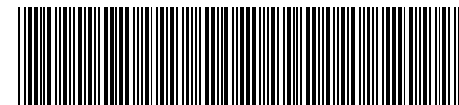
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (526768) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	57.150.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	57.150.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526768/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2403-8802-3802-2751

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (526768) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526768	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA	-	57.150	-	-	-	57.150	05 . 03	
005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	-	57.150	-	-	-	57.150		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	57.150	-	-	-	57.150		
1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	-	25.000	-	-	-	25.000		
01	RM	-	25.000	-	-	-	25.000		
1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara [PN]	-	350	-	-	-	350		
01	RM	-	350	-	-	-	350		
1059.003	Pos Bantuan Hukum [PN]	-	31.800	-	-	-	31.800		
01	RM	-	31.800	-	-	-	31.800	165	
JUMLAH		-	57.150	-	-	-	57.150		

JAKARTA, 12 November 2019
Direktur Jenderal Badilimlun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526768/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode/Nama Satker : (526768) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

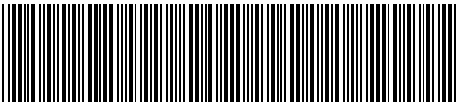
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526768	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.700	4.700	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	57.150
		52 BELANJA BARANG	5.700	4.700	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	57.150
		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	5.700	4.700	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	57.150
	005.05.09.1059	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.700	4.700	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675	57.150

JAKARTA, 12 November 2019
Direktur Jenderal Badilimlun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526768/2020
IV A. B L O K I R



DS:2403-8802-3802-2751

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [526768] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

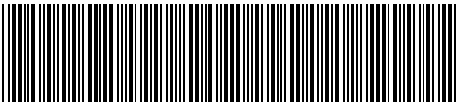
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 12 November 2019
Direktur Jenderal Badilmiltun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526768/2020
IV B. C A T A T A N



DS:2403-8802-3802-2751

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [526768] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 12 November 2019
Direktur Jenderal Badilmiltun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002